

**POLA KEPEMIMPINAN APARATUR PEMERINTAHAN DALAM
MEMOBILISASI PARTISIPASI PEMBANGUNAN**
(Studi pada Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial

ILMU ADMINISTRASI NEGARA



Oleh:
NOVIANUS FRANSISKUS NAHAK
2014210103

**KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2018**

Novianus Fransiskus Nahak, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, 2018

POLA KEPEMIMPINAN APARATUR PEMERINTAHAN DALAM MEMOBILISASI PARTISIPASI PEMBANGUNAN

(Studi pada Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu)

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Agung Suprojo, S.Kom., MAP

Dosen Pembimbing Pendamping : Roro Merry Chornelia W. S.Pd., MAP

ABSTRAK

Suatu Desa atau wilayah berkembang atau tidaknya tergantung pada seorang pemimpin dan aparatur Daerah atau Kepala Daerah, karena merupakan salah satu cara untuk mobilisasi dalam partisipasi demi pembangunan suatu Daerah tersebut. Adapun jenis riset yang akan digunakan ialah deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan yang akan digunakan pada riset ini ialah dokumentasi, interview serta observasi sedangkan informan yang digunakan ialah pihak pemerintah yang berada di desa serta kalangan masyarakat. Sampel yang akan digunakan pada riset ini ialah menggunakan *snowball sampling*. Pengujian yang akan digunakan ialah pengujian keabsahan data, sehingga dalam riset ini peneliti menggunakan sebuah teknik triangulasi. Analisa data yang akan digunakan pada riset ini ialah reduksi data sampai dengan penarikan sebuah kesimpulan. Pola kepemimpinan aparatur pemerintah dalam memobilisasi terkait dengan sistem partisipasi oleh kalangan masyarakat demi sistem pembangunan yang berada pada Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu sebagai berikut: pola kepemimpinan demokratis sangat membantu mobilisasi masyarakat dalam pembangunan desa. Karena didalamnya terdapat pula kerjasama yang baik, dengan pendapat dalam musyawarah antar elemen yang terlibat dalam pembangunan desa serta komunikasi yang baik dari pemimpin dan bawahan semakin memperkuat daya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Faktor pendukung dalam memobilisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa ialah melimpahnya tenaga kerja di desa, semangat dan dukungan dari aparatur pemerintah, kerjasama yang baik antar elemen masyarakat, kerjasama yang baik antar lembaga pemerintah sedangkan faktor penghambat adalah tingkat kesadaran masyarakat yang kurang, sumber daya manusia atau tingkat pendidikan yang rendah.

Kata kunci: Pemerintah, Partisipasi, Masyarakat, Pembangunan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semua pihak organisasi dapat membutuhkan sistem kerjasama antara kalangan manusia yang mana menyadari bahwa sebuah permasalahan manusia yang terutama ialah tingkat kepemimpinan. Kita melihat tingkat perkembangan dari sistem kepemimpinan secara ilmiah terhadap kepemimpinan di kalangan institusi serta tingkat pencapaian yang secara praktis. Sistem kepemimpinan itu secara langsung akan dilihat sebagai salah satu pembawaan diri dari seseorang yang mana secara langsung diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu perlu dicari lah sosok pimpinan yang memiliki sebuah karakter yang jauh lebih baik yang akan dipandang sebagai salah satu cara untuk mensukseskan seorang manajemen atau kepemimpinan. Adapun sebuah tingkatan yang secara ilmiah kepemimpinan akan dilihat sebagai salah satu cara atau salah satu faktor yang mendorong karakter seseorang, oleh dapat unsur terhadap kita untuk dapat melaksanakan sehingga tingkat kepemimpinan dapat melaksanakan sebuah kinerja secara baik dalam suatu institusi yang secara berbeda (Widarto, 2013).

Sistem kepemimpinan dapat dikatakan sebagai salah satu bagian dari keahlian serta memiliki sifat kepribadian sebagaimana dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam rangka meyakinkan serta dapat didampingi sehingga mereka mampu untuk melaksanakan berbagai macam tugas dan tanggung jawab yang akan diberikan kepadanya. Keahlian seseorang dalam menjalankan sebuah

tugas sebagai pemimpin secara langsung dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap proses infrastruktur atau proses pembangunan di kalangan desa.

Adapun sebuah konsep yang jauh lebih baik terkait dengan kepemimpinan yang mana akan melahirkan sebuah peperangan yang jauh lebih baik oleh seorang pimpinan. Adapun sebuah taktik dalam sebuah pimpinan orang yang membuat perencanaan dengan membangun sebuah kerangka berpikir serta dapat mengambil sebuah keputusan dalam perkalian jawab atas kelompok serta terhadap orang-orang yang berada di sekitar. Terhadap sebuah anggapan bahwa sistem pengertian dapat dimaksimalkan dalam berbagai macam cara antara lain sebuah sistem koordinator serta pelatihan terhadap kelompok yang akan ditentukan. Sebuah fungsi yang paling pertama ialah dapat membantu sebuah kelompok untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagaimana telah diputuskan dalam sistem kinerja yang lebih baik dan efisien dalam sebuah tindakan sebut peranan sebagai seorang pimpinan serta dapat memberikan berbagai macam batuan yang secara utuh, misalnya seorang pimpinan dapat membantu sehingga dapat terciptanya sebuah keilmuan sosial yang jauh lebih baik seorang pimpinan secara langsung dapat membantu pihak kelompok dalam menetapkan berbagai macam mekanisme dalam melaksanakan sistem kerja (Sukamto, 2014).

Dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara sudah menjadi tugas pokok Pemerintah sebagai penyelenggara untuk memenuhi kesejahteraan rakyatnya, upaya tersebut merupakan upaya pembangunan. Rogers (dalam Suryono., 2010) mengatakan sistem infrastruktur atau sering dikenal sebagai pembangunan dapat dikatakan sebagai salah satu mekanisme untuk melakukan sebuah perubahan di

kalangan sosial sebagaimana perlu diselenggarakan dengan berbagai macam cara untuk memberikan sebuah kesempatan yang seluasnya terhadap kalangan masyarakat untuk bekerjasama demi mensukseskan pembangunan desa yang jauh lebih efektif baik itu secara material maupun secara sosial.

Pada konteks infrastruktur di Indonesia, Pancasila, UUD 1945 kemudian UU Tahun 2014 No 23 yang berkaitan dengan sistem pemerintahan daerah sebagaimana akan diberikan sebuah tindakan kewenangan oleh pihak pemerintahan yang berada di kalangan pusat untuk mengatur serta mengurus daerah sesuai dengan potensi Daerah masing-masing, serta UU Tahun 2004 No 25 yang berkaitan dengan perencanaan yang secara nasional kemudian ini yang menjadi landasan utama dalam pembangunan di Indonesia.

Aturan ini menjadi pondasi utama model pembangunan *bottom-up* yang merupakan bentuk partisipatoris yaitu bentuk pelibatan masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Artinya proses yang dimaksudkan, yakni bukan sekedar ketika tahap perencanaan saja, melainkan juga pada tahap pelaksanaan program pembangunan, pengawasan, serta tahap evaluasi hasil pembangunan, sehingga munculah paradigma baru dalam pembangunan yaitu “pembangunan berbasis masyarakat”. Menurut Theresia, dkk (2014) menyatakan bahwa pembangunan berbasis masyarakat, secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan sebesar-besarnya pada tingkat kegunaan serta sistem pada potensi sumber daya ada dan dapat diakses oleh kalangan masyarakat setempat. Dengan demikian masyarakat menjadi sumber daya yang

jauh lebih tinggi yang artinya bahwa perumusan program pembangunan berbasis Iklan masyarakat yang mana sih harus besarnya pada tingkat pemanfaatan potensi sumber daya yang tersedia di kalangan masyarakat sistem penerimaan terhadap pemanfaatan sendiri dalam bentuk moral serta SDM berlandaskan pada kelembagaan yang sudah di dan tumbuhan.

Adapun pembangunan berbasis masyarakat peran aktif dikalangan masyarakat sehingga dapat dikatakan sebuah tingkat kesadaran serta tingkat kepedulian terhadap tanggung jawab oleh masyarakat peranakan pada tingkat kepentingan pada infrastruktur yang memiliki sebuah tujuan untuk memperbaiki taraf kehidupan mereka yang berada di desa Benar-benar akan menjeda terhadap kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan merupakan bngunan dari, oleh, danuntuk masyarakat, senhinga Dalam sebuah upaya untuk melaksanakan pembangunan seharusnya memiliki tingkat kemampuan yang jauh lebih tinggi sebagaimana dengan tujuan untuk dapat mengembangkan setelah dapat memanfaatkan pada potensi sumberdaya yang ada di kalangan masyarakat, ada beberapa cara misalnya proses pembangunan yang akan melibatkan sebuah dampak yang secara berganda terhadap tumbuhnya berbagai macam upaya dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan, sehingga dengan adanya sebuah garapan ADA serta SDM yang akan mendatang. Theresia (2014 : 262), menyatakan bahwa apabila tingkat potensi sumber daya yang secara lokal sama sekali tidak dapat dilaksanakan penggarapan serta dapat bergantung Pada aspek yang secara eksternal, sehingga celaka akan dapat dipastikan terhadap

sebuah tindakan kemampuan yang akan datang berkaitan dengan sumber daya itu sendiri.

Kepemimpinan Sebagaimana dikatakan oleh Pancasila ialah seorang pimpinan seharusnya memiliki sebuah sikap dalam mengasuh serta memotivasi dengan tujuan untuk dapat menentukan sebuah usahanya. Oleh karena itu ada beberapa mekanisme yang berkaitan dengan asas kepemimpinan Pancasila ialah :

(a) Tut Wuri Handayani merupakan salah satu cara yang dimiliki oleh seorang pimpinan yang mampu untuk mendorong beberapa orang yang biasanya untuk orang melaksanakan serta berani menjalankan apa yang di depan serta sanggup untuk bertanggung jawab, (b) Ing Madya Mangun Karsa Adalah seorang pimpinan yang seharusnya mampu untuk melakukan sebuah pembangkit semangat serta dapat juga melaksanakan sebuah reaksi terhadap orang lain yang ada serta (c) Ing Ngarsa Sung Tuladha Iyalah seorang pimpinan yang seharusnya memiliki sebuah karakter serta tindakan perbuatan yang akan dijadikan dirinya sebagai salah satu panutan terhadap orang lain.

Kepemimpinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah proses yang secara langsung dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap pimpinan dalam sebuah tindakan dalam upaya untuk mencapai sebuah tujuan organisasi yang dalam bentuk ilmiah sebagaimana dapat mempelajari terkait dengan tingkat kepemimpinan merupakan sebuah tindakan yang melaksanakan serta bekerja yang secara praktis misalnya sebuah penekanan terhadap seseorang yang memiliki keahlian misalnya pengrajin sebagai salah satu bagian dari sebuah tindakan yang memberikan peran dalam sebuah instruksi. Stet. P. Robbins (2005)

Pimpinan merupakan salah satu orang yang memiliki semua terhadap orang lain berlandaskan pada sebuah kewenangan yang secara manajerial, sebagaimana berdasarkan pada definisi tersebut kepemimpinan dapat dinyatakan sebagai salah satu orang yang memiliki keahlian dengan tujuan untuk dapat mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih baik.

Suatu Desa atau wilayah berkembang atau tidaknya tergantung pada seorang pemimpin dan aparatur Daerah atau Kepala Daerah, karena merupakan salah satu cara untuk mobilisasi dalam partisipasi demy sistem pembangunan di Daerah yang ada. Desa Giripurno. Kecamatan Bumiaji Kota Batu merupakan salah satu Desa yang memiliki aparatur Desa yang sangat peduli dengan pembangunan dan gotong royong bersama masyarakat demi pembangunan Desa mereka, tingkat keberadaan seorang pimpinan serta aparatur yang berada di pemerintah desa sangat membutuhkan serta dapat memberikan sebuah pemasukan atau tingkat kontribusi dalam sistem infrastruktur di kalangan pedesaan dengan tujuan untuk dapat mewujudkan tingkat kesejahteraan yang ada di masyarakat. Salah satu persoalan mendasar terhadap sebuah proses dalam melaksanakan sebuah penyelenggaraan pemerintah yang berada di desa merupakan sebagian dari sistem pembangunan demi menciptakan mekanisme pemerintah yang dapat mengembangkan sebuah misi dalam mewujudkan masyarakat untuk menggapai sebuah kesejahteraan berlandaskan pada tingkat keadilan. yang mana dapat mewujudkan kesejahteraan terhadap pandangan masyarakat tersebut pihak pemerintah seharusnya dapat melakukan sistem pembangunan yang mana berlandaskan pada tingkat partisipasi yang ada di kalangan masyarakat oleh

Rasyid 1996 dalam Syafiie (2004), menyatakan bahwa salah satu hakikat keberadaan pihak pemerintah serta birokrasi dapat dikatakan sebagai salah satu rangkaian dalam melaksanakan tugas dengan tujuan untuk dapat memberikan sebuah pelayanan yang jauh lebih baik terhadap masyarakat. Pemerintah buka sebagai salah satu yang akan tetapi dapat melaksanakan sebuah pelayanan terhadap kalangan masyarakat demi menciptakan sebuah situasi yang jauh lebih baik sehingga dapat memungkinkan seluruh anggota kalangan masyarakat untuk dapat melaksanakan pembangunan yang berkaitan dengan keahlian serta kearifan demi mencapai kemajuan yang secara bersama-sama.

Syamsuddin (2007) mengatakan bahwa pihak pemerintah yang lebih baik itu berasaskan pada beberapa kategori antara lain : (a) pihak pemerintah memiliki sebuah fungsi yang secara ideal serta memiliki tingkat keefektifan dalam melaksanakan sebuah perencanaan dengan tujuan untuk menggapai sebuah pembangunan yang secara nasional yang lebih baik serta (b) pihak pemerintah juga dapat berorientasi pada ideal sebuah negara yang mana akan diarahkan untuk mencapai sebuah tujuan nasional yang mengacu pada sistem demokrasi serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu guna mengetahui pola kepemimpinan aparatur kepemimpinan dalam memobilisasi partisipasi pembangunan pada Desa Giripurno. Kecamatan Bumiaji Kota Batu, maka peneliti mencoba akan mengamati dan observasi pada Desa Giripurno. Kecamatan Bumiaji Kota Batu dengan judul: **“Pola Kepemimpinan Aparatur Pemerintahan Dalam Memobilisasi Partisipasi Pembangunan”**

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang tersebut, sehingga pada riset ini rumusan masalah yang akan diangkat antara lain :

1. Bagaimana Pola Kepemimpinan Aparatur Pemerintahan dalam Mobilisasi Partisipasi Pembangunan di Desa Giripurno. Kecamatan Bumiaji Kota Batu?
2. Apa Faktor pendukung serta faktor penghambat terhadap pola kepemimpinan aparatur pemerintahan dalam memobilisasi partisipasi Pembangunan di Desa Giripurno. Kecamatan Bumiaji Kota Batu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang tersebut, sehingga pada riset ini rumusan masalah yang akan diangkat antara lain :

1. Untuk mengetahui Pola Kepemimpinan Aparatur Pemerintahan dalam Mobilisasi Partisipasi Pembangunan di Desa Giripurno. Kecamatan Bumiaji Kota Batu!
2. Untuk dapat mengetahui Faktor pendukung serta faktor penghambat terhadap Pola Kepemimpinan Aparatur Pemerintahan dalam Memobilisasi Partisipasi Pembangunan di Desa Giripurno. Kecamatan Bumiaji Kota Batu!

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Riset ini akan selalu diharapkan untuk dapat memperkaya wawasan bagi penelitian Ilmu Administrasi Negara dan sebagai sumber bacaan di lingkungan FISIP Unitri serta untuk menambahkan pengetahuan mengenai

Pola Kepemimpinan Aparatur Pemerintahan dalam Mobilisasi Partisipasi Pembangunan.

2. Manfaat Praktis

a. Riset ini akan selalu diharapkan untuk dapat memberikan sebuah data atau informasi guna terhadap mahasiswa tentang Bagaimana Pola Kepemimpinan Aparatur Pemerintahan dalam Mobilisasi Partisipasi Pembangunan.

b. Memberi sumbangan pengetahuan dan dapat dijadikan sebuah acuan terhadap pihak-pihak yang mau memahami terkait dengan Pola Kepemimpinan Aparatur Pemerintahan dalam Mobilisasi Partisipasi Pembangunan di Desa Giripurno. Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

3. Manfaat Bagi Mahasiswa Unitri

a. Mahasiswa UNITRI bisa mengetahui bagaimana Pola Kepemimpinan Aparatur Pemerintahan dalam Mobilisasi Partisipasi Pembangunan di Desa Giripurno. Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

b. Mahasiswa memiliki frekuensi lebih luas terkait Pola Kepemimpinan Aparatur Pemerintahan dalam Mobilisasi Partisipasi Pembangunan di Desa Giripurno. Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hasibuan. 2009. *Kepemimpinan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Kepemimpinan Menurut Pancasila*.
- Kartono Karitni. 2013. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Moleong, I. J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Rosdakarya. Bandung.
- Moleong, Lofland. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya. Bandung
- Ndhara, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nursalam. 2007. *Kepemimpinan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Nursalam. 2007. *Kepemimpinan*. Setara Press. Kelompok Penerbit Intrans.
- Rasyid. 1996. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Riva'I. 2011. *Kepemimpinan*. Raja Grafindo Persaja. Jakarta.
- Riva'I. 2011. *Kepemimpinan (Leadership)*. Raja Grafindo Persaja. Jakarta.
- Robbins Step. P. 2005. *Kepemimpinan*. PT INDEKS Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Sugiyono. 2006. *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
2012. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Alfabeta. Bandung
2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Alfabeta Bandung.
2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Alfabeta. Bandung.
- Sukanto. 2014. *Peran Penting Kepemimpinan Dalam Dunia Pendidikan*. Universitas Negeri. Malang.
- Syafiie. 2014. *Ilmu Pemerintahan*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
2014. *Ilmu Pemerintahan*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Syamsuddin. 2007. *Ilmu Pemerintahan Desa*. PT Rosda. Karya Remaja.
- Tannenbaum, Weachter dan Massarik dalam Muninjaya. 2004. *Kepemimpinan*. Raja Grafindo Persaja.
- Theressia, Aprillia dkk. 2014. *Pembanguna Berbasis Masyarakat*. Alfabeta. Bandung.
- Widarto. 2013. *Kepemimpinan Leadership*. Universitas Negeri. Yogyakarta.

Skripsi:

- Mile. 2013. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*. Skripsi. Boelemo.

Undang-Undang:

Lembaran Negara No. 27 Tahun 1997 Tentang Mobilisasi dan Demobilisasi dan Asas Penyelenggara Mobilisasi.

Lembaran Negara, Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Lembaran Negara, Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.